



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Jakarta, 5 Januari 2022

Nomor : 21 /SEK/KU.00/01/2022
Sifat : Penting
Lampiran : Satu set
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan
dan Permintaan Dokumen

Yth. Daftar Nama Jabatan Terlampir

Berdasarkan Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Anggota III Nomor 39/ST/V-XVI.1/01.2021 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Mahkamah Agung di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali, serta Surat Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01/LK-MA/01/2022 tanggal 3 Januari 2022 hal Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen (terlampir), dengan ini diminta kepada Saudara untuk menyiapkan dan memenuhi permintaan dokumen yang dibutuhkan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung;
5. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
8. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung;
9. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.

Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 21 /SEK/KU.00/01/2022
Tanggal : 5 Januari 2022

Daftar Nama Jabatan

Eselon I Pusat

1. Panitera Mahkamah Agung
2. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung
3. Kepala Biro Perlengkapan BUA Mahkamah Agung
4. Kepala Biro Umum BUA Mahkamah Agung
5. Kepala Biro Kepegawaian BUA Mahkamah Agung
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung
7. Kepala Biro Sekretaris Pimpinan BUA Mahkamah Agung
8. Kepala Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung
9. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung
10. Sekretaris Ditjen Badilum Mahkamah Agung
11. Sekretaris Ditjen Badilag Mahkamah Agung
12. Sekretaris Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung
13. Sekretaris Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung
14. Kepala UKPBJ Mahkamah Agung

Wilayah DKI Jakarta

15. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
16. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
17. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
18. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Umum se-Jakarta
19. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Agama se-Jakarta
20. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
21. Kepala Pengadilan Militer Utama
22. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Di Jakarta
23. Kepala Pengadilan Militer II-08 Di Jakarta
24. Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta
25. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
26. Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
27. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Umum se-Jakarta
28. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Agama se-Jakarta
29. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
30. Sekretaris Pengadilan Militer Utama
31. Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi II Di Jakarta
32. Sekretaris Pengadilan Militer II-08 Di Jakarta

Wilayah Jawa Barat

33. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
34. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
35. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Umum se-Jawa Barat
36. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Agama se-Jawa Barat
37. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
38. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung

39. Sekretaris Pengadilan Tinggi Bandung
40. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
41. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Umum se-Jawa Barat
42. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Agama se-Jawa Barat
43. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
44. Sekretaris Pengadilan Militer II-09 Bandung

Wilayah Jawa Tengah

45. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
46. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
47. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Umum se-Jawa Tengah
48. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Agama se-Jawa Tengah
49. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
50. Kepala Pengadilan Militer II-10 Di Semarang
51. Sekretaris Pengadilan Tinggi Semarang
52. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang
53. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Umum se-Jawa Tengah
54. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Agama se-Jawa Tengah
55. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
56. Sekretaris Pengadilan Militer II-10 Di Semarang

Wilayah Bali

57. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
58. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram
59. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
60. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Umum se-Denpasar
61. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Agama se-Denpasar
62. Kepala Pengadilan Militer III-14 Di Denpasar
63. Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar
64. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Mataram
65. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
66. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Umum se-Denpasar
67. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Agama se-Denpasar
68. Sekretaris Pengadilan Militer III-14 Di Denpasar



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210, Telepon (021) – 25549000 Ekstensi 3562 Faksimile (021) 5700501

SURAT TUGAS

Nomor: 39 /ST/V-XVI.1/01/2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan memberi tugas kepada:

No	Nama	Jabatan	Jangka Waktu
1.	Bambang Pamungkas	Penanggung Jawab	10 hari
2.	Ahmad Adib Susilo	Wakil Penanggung Jawab	15 hari
3.	Martuama saragi	Wakil Penanggung Jawab	15 hari
4.	Tumpal P. Sidabalok	Pengendali Teknis	45 hari
5.	Ratna Juliawati	Pengendali Teknis	45 hari
6.	Yossie Andri Hendrawan	Pengendali Teknis	45 hari
7.	Rafael Driarko Wardono	Ketua Tim	80 hari
8.	Indri Gatari Mauludin	Ketua Sub Tim	80 hari
9.	Ari Herdiawan	Ketua Sub Tim	80 hari
10.	Theones Ronald	Ketua Sub Tim	80 hari
11.	Gede Ayusari Lendra	Anggota Tim	80 hari
12.	Andiasti Herdiani	Anggota Tim	80 hari
13.	Imam Rochmadi	Anggota Tim	80 hari
14.	Hardi Cornelis Gultom	Anggota Tim	80 hari
15.	Muhammad Fadly	Anggota Tim	80 hari
16.	M. Ardiansyah	Anggota Tim	80 hari
17.	Chandra Wemy Kurniawan	Anggota Tim	80 hari
18.	Linda Oktavia	Anggota Tim	80 hari
19.	Johan Kusuma	Anggota Tim	80 hari

Untuk melakukan : Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Mahkamah Agung di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali.

Jakarta, 3 Januari 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
ANGGOTA III,**


Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFA., CFP®

Tembusan:

1. Ketua BPK
2. Ketua Mahkamah Agung
3. Wakil Ketua BPK
4. Sekretaris Mahkamah Agung
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung
6. Panitera Mahkamah Agung
7. Sekretaris Jenderal BPK
8. Auditor Utama Keuangan Negara III BPK
9. Inspektur Utama BPK
10. Kepala Ditama Revbang BPK



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210, Telepon 021-25549000 Ekstensi 3562 Faksimile 021-5700501

Jakarta, 3 Januari 2022

Nomor : 01/LK-MA/01/2022
Lampiran : Dua berkas
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen

Yth.
Sekretaris Mahkamah Agung
di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Mahkamah Agung sesuai Surat Tugas No. 39/ST/V-XVI.1/12/2021 tanggal 3 Januari 2022 (terlampir), kami beritahukan bahwa pelaksanaan tugas pemeriksaan selama 80 hari dan akan dimulai pada tanggal 3 Januari 2022.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan tersebut, kami membutuhkan dokumen-dokumen sebagai bukti dukung pertanggungjawaban dari proses pemeriksaan yang kami lakukan (terlampir). Dokumen lainnya yang belum tercantum dalam lampiran surat ini akan kami mintakan kemudian dalam pelaksanaan pemeriksaan. Bersama dengan surat pemberitahuan dan permintaan dokumen ini, kami sertakan Surat Tugas, Daftar Permintaan Dokumen serta Daftar Satuan Kerja Uji Petik.

Demikianlah pemberitahuan kami. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Ketua Tim,

Rafael Driarko Wardono

NIP 198002182006041001

Tembusan Yth.:

1. Penanggung Jawab
2. Pengendali Teknis

DAFTAR PERMINTAAN DOKUMEN

Data Umum Entitas (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. SK Pengelola Anggaran (meliputi KPA, PPK, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran)
2. Struktur Organisasi dan uraian tugas pokok fungsi (nama, jabatan dan nama pejabat s.d. Eselon IV, dilengkapi informasi nomor selular/Ext)
3. Daftar Pegawai/*Bezetting* per bulan (Posisi per 31 Des 2020 s.d 31 Des 2021)
4. Pedoman Akuntansi Mahkamah Agung Tahun 2020
5. Standar Operasional dan Prosedur yang masih berlaku terkait :
 - a. Penganggaran;
 - b. Kepegawaian dan penggajian;
 - c. Pengadaan barang/jasa dan persediaan;
 - d. Pengadaan belanja modal serta pengelolaan aset tetap dan aset tak berwujud;
 - e. Pengelolaan piutang dan penerimaan pendapatan;
 - f. Pengelolaan kas;
 - g. Akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - h. Pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran
- i. DIPA, RKA KL dan POK Tahun 2021 (awal s.d. revisi terakhir)
- j. SK Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021 dan SK Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Tahun 2021, beserta Dokumen Pendukungnya (disertai dengan sertifikat keahlian)
- k. SK tentang ULP Korwil (meliputi rincian kelompok kerja)
- l. Salinan SK Pembentukan LPSE
- m. Surat Keputusan (SK) Penerima Barang/Jasa 2021
- n. Surat Keputusan kepanitiaan/kegiatan 2021
- o. Surat Keputusan Penetapan/Penunjukkan Pejabat dan Petugas Penyimpan Barang
- p. Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus Tahun 2021
- q. Peraturan terakhir yang mengatur besaran tarif PNBPN di Lingkungan Mahkamah Agung beserta perubahannya

Dokumen Keuangan (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. Laporan Keuangan Tahun 2021 (termasuk Laporan Keuangan TW I, II, III, dan IV)
2. Laporan Realisasi s.d 31 Desember 2021 (meliputi realisasi keseluruhan, per jenis belanja, perkegiatan)
3. Berita Acara Rekonsiliasi SAIBA bulanan dan triwulanan Tahun 2021
4. *Backup data* ADK data gaji dan ADK perubahan pegawai dari aplikasi GPP yang dikirim ke KPPN seluruh satker
5. *Backup data* ADK E-Rekon, SAS, SAIBA, SILABI dan SIMPONI Tahun 2021 seluruh satker (sampai dengan data terakhir)

6. Daftar Rincian SPM dan SP2D Tahun 2021 seluruh satker (*output* dari SAIBA) beserta bukti pendukungnya
7. Buku besar/buku besar pembantu/buku pembantu/daftar/ rekapitulasi atau catatan lainnya Per Akun untuk seluruh akun dalam laporan keuangan
8. Daftar rincian SPM dan SP2D Tahun 2021 (*output* dari OM SPAN) per eselon 1.
9. User ID dan *password login* pada Komdanas Mahkamah Agung

Dokumen Barang Milik Negara (BMN) (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. Laporan BMN Tahunan beserta Catatan Ringkas BMN Tahun 2021
2. Laporan BMN Tahun 2021
3. Laporan Mutasi BMN Tahun 2021
4. Berita Acara Rekonsiliasi SIMAK BMN semesteran
5. *Backup data* SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan Tahun 2021 seluruh satker (sampai dengan data terakhir)
6. Laporan Persediaan per 31 Desember 2021 seluruh Satker
7. Berita Acara *Stock Opname* seluruh Satker
8. Usulan Penghapusan dan SK Penghapusan BMN (jika ada) seluruh Satker
9. Berita Acara Verifikasi dan Validasi Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Tahun 2020 seluruh Satker
10. Daftar BMN yang dikuasai/disewa oleh pihak ketiga
11. Daftar Kendaraan Dinas dan Surat Keputusan penunjukkan pengguna kendaraan dinas
12. Daftar Tanah, Gedung dan Bangunan berikut data penghunian rumah dinas
13. Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2021
14. Dokumen pengadaan tanah Tahun 2021

Belanja Modal (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. Rencana umum pengadaan Tahun 2021 seluruh satker
2. User ID dan *password login* pada *website* LPSE Mahkamah Agung
3. Daftar Pengadaan Barang/Jasa (meliputi pelelangan/pengadaan langsung/penunjukkan langsung) seluruh satker
4. Rekapitulasi data kontrak belanja barang/jasa/modal (yang didaftarkan pada KPPN) seluruh satker
5. Rincian realisasi Belanja Modal Tahun 2021 seluruh satker. **Untuk masing-masing pengadaan barang/jasa berisi informasi:**
 - a. Dokumen lelang/pengadaan langsung/penunjukkan langsung/seleksi sederhana
 - b. Dokumen pengadaan
 - c. Dokumen Penawaran Pemenang I, II, III
 - d. HPS atau *OE*
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

- f. Analisa perhitungan harga satuan
 - g. Surat-surat Jaminan Pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan Uang Muka
 - h. Dokumen pembayaran (SPM)
 - i. SP2D Asli dan dokumen pendukungnya.
 - j. Surat Penunjukan Pemenang
 - k. SPMK
 - l. Kontrak, Addendum dan Justifikasi Teknik
 - m. Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian
 - n. *Back Up Data Quality* dan *Quantity*
 - o. Gambar Perencanaan (*shop drawing*)
 - p. Gambar Terpasang (*as built drawing*)
 - q. Foto dokumentasi 0% s.d posisi terakhir
 - r. Berita Acara Pemeriksaan Fisik
 - s. Berita Acara Pembayaran
 - t. BA Serah Terima, PHO dan FHO
3. Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Pengadaan (Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa termasuk Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan/Konsultansi) Tahun 2021 seluruh satker (yang menggambarkan nama rekanan-rekanan melaksanakan kegiatan belanja modal tersebut, jangka waktu pelaksanaan, metode pengadaan, serta nilai pengadaan)
 4. Daftar Pengadaan Belanja Modal dan Barang/Jasa seluruh satker yang sumber dananya selain anggaran MA/Satker

Bendahara Pengeluaran (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. BKU dan Buku Pembantu Tahun 2021 Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta BA Pemeriksaan Kas oleh PPK Tahun 2021
3. Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Tahun 2021
4. Buku Panjar
5. Surat Setoran Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2020 dan 2021
6. Dokumen bukti pertanggungjawaban Belanja (Laporan kegiatan, kuitansi, bukti perjalanan dinas, dst)

PNBP/Bendahara Penerimaan (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. BKU Bendahara Penerimaan Tahun 2021
2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan BA Pemeriksaan Kas oleh PPK Tahun 2021
3. Rekapitulasi SSBP Tahun 2021 beserta bukti pendukungnya

Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. Laporan Keuangan Perkara (penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara) Tahun 2021 per satker
2. Rekapitulasi Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya (Biaya Eksekusi, Konsinyasi, dll) Tahun 2021 per satker
3. Sisa panjar biaya perkara yang belum dikembalikan ke para pihak/belum disetorkan ke kas negara Tahun 2021
4. Rekening Koran Keuangan Perkara dan Uang Titipan per 31 Des 2020 s.d 31 Des 2021.
5. Perjanjian Kerjasama satuan kerja dengan Bank Terkait Rekening Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga
6. Laporan Jasa Giro & Bukti Penyetoran Kas Negara atas Rekening Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga

Lain-lain

1. Bukti-bukti tindak lanjut (penyetoran) temuan Pemeriksaan DTT Belanja MA Tahun 2021
2. Data-data perolehan hibah dari pihak-pihak dalam negeri (pemerintah daerah, lembaga keuangan- termasuk PPO BTN, dsb) dan hibah dari pihak-pihak luar negeri tahun 2021.

Wilayah Jakarta :

1. Badan Urusan Administrasi (BUA)
2. Kepaniteraan
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat Kumdil)
4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum)
5. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag)
6. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen MilTUN)
7. Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Umum
8. Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Agama
9. Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Militer dan TUN

Wilayah Jawa Barat

1. Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Umum
2. Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Agama
3. Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Militer dan TUN

Wilayah Jawa Tengah

1. Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Umum
2. Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Agama
3. Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Militer dan TUN

Wilayah Bali

1. Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Umum
2. Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Agama
3. Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama untuk Peradilan Militer dan TUN